



## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Hartoto<sup>1</sup>, Hasim As'ari<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang<sup>1</sup>

Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau<sup>2</sup>

ir.hartoto@gmail.com<sup>1</sup>, hasimasari2005@gmail.com<sup>2</sup>

### Info Artikel :

Diterima : 8 Oktober 2021

Disetujui : 12 Oktober 2021

Dipublikasikan : 25 November 2021

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
Kemiskinan,  
Distribusi  
pendapatan  
dan  
program  
pengentasan  
kemiskinan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Penulisan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2021. Metode analisis data menggunakan rasio pengukuran indikator kemiskinan. Dari hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa pandemi covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau berdampak terhadap: (1) Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari jumlah dan presentase penduduk miskin cenderung naik; (2) Koefisien Gini penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau cenderung naik, sehingga adanya ketimpangan distribusi pendapatan; (3) Dilihat perkembangan nilai P0, P1, dan P2, maka dapat dilihat bahwa pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan membutuhkan biaya, waktu dan perhatian yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan; dan (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat menurunkan jumlah dan presentase penduduk miskin. Maka direkomendasikan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat dilanjutkan.

### ABSTRACT

**Keywords :**  
Poverty,  
Income  
distribution  
and poverty  
alleviation  
programs

*This paper aims to examine the impact of the Covid-19 Pandemic on Poverty in the Riau Islands Province. The writing uses secondary data published by BPS Riau Islands Province in 2019-2021. The data analysis method uses the ratio of measurement of poverty indicators. From the results and discussion it was concluded that the COVID-19 pandemic in the Riau Islands Province had an impact on: (1) The poor population in the Riau Islands Province seen from the number and percentage of the poor tended to increase; (2) the Gini coefficient of the poor in the Riau Islands Province tends to increase, so that there is an inequality in income distribution; (3) Looking at the development of the values of P0, P1, and P2, it can be seen that poverty alleviation in rural areas requires greater cost, time and attention when compared to poverty in urban areas; and (4) poverty reduction programs implemented by the government, both central*

*and regional, can reduce the number and percentage of poor people. Therefore, it is recommended that poverty reduction programs implemented by the government, both central and regional, can be continued.*

---

## PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian baik pemerintah. Kemiskinan setidaknya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk dapat hidup dan bekerja. Nilai minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Sedangkan penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan<sup>1</sup>.

Berdasarkan data BPS (2021), persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang. Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525,00/ kapita/bulan.

Bagaimana dengan data di Provinsi Kepulauan Riau? Berdasarkan uraian diatas untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan mengkaji dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

## KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan dilihat dari kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum (garis kemiskinan). Sedangkan penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin<sup>2</sup>.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P \propto \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^z \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^2$$

di mana:

- $\alpha$  = 0, 1, 2
- $z$  = Garis kemiskinan
- $y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,
- $y_i < z, q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- $n$  = Jumlah penduduk.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek untuk mengukur kemiskinan relatif. Karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran. Dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan ukuran Bank Dunia.

Berdasarkan penelitian Hartoto (2019), di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2017, bahwa: (1). Penduduk miskin ada penurunan; (2) Koefisien gini penduduk miskin terjadi kenaikan; dan (3). Rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan<sup>3</sup>.

Penelitian Hartoto (2020), di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019. Bahwa: (1). Tingkat kemiskinan penduduk ada kecenderungan terjadi penurunan; (2) Ketimbangan distribusi pendapatan berdasarkan koefisien gini berada dalam kategori sedang; (3). Distribusi pendapatan penduduk miskin terjadi kenaikan, ketimpangan penduduk miskin lebih baik di wilayah perdesaan dibandingkan di perkotaan; dan (4). Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah mampu menurunkan jumlah dan presentase penduduk miskin.

## METODE PENELITIAN

Data BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2019-2021. Analisis kuantitatif dengan menghitung indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, koefisien gini, dan distribusi pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia.

1. **Head Count Index (HCI-P<sub>0</sub>)**, adalah persentase penduduk yang berada dibawah GK.
2. (**P<sub>1</sub>**), Dengan kriteria tingginya nilai indeks menunjukkan pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin jauh.
3. (**P<sub>2</sub>**). Dengan kriteria tingginya nilai indeks menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
4. **Kriteria Kemiskinan Bank Dunia**. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan didefinisikan kondisi tingkat pendapatan penduduk tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Gambaran GK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perkembangan GK di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2019-2021

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp)			
	September 2019	Maret 2020	September 2020	Maret 2021
<b>Kepulauan Riau</b>				
<b>Perkotaan</b>	605.210	616.743	619.461	644.501
<b>Perdesaan</b>	577.259	595.249	597.899	614.746
<b>Perkotaan dan Perdesaan</b>	602.038	614.727	617.532	642.425

Sumber: BPS (2019-2021, diolah)

Dari Tabel 1. terlihat GK di Provinsi Kepulauan Riau sebelum pandemic Covid-19 (bulan September 2019) sebesar Rp. 602.038 per kapita per bulan dan terus terjadi kenaikan menjadi Rp. 614.727 per kapita per bulan pada bulan Maret 2020 dan naik menjadi Rp. 617.532 per kapita per bulan pada bulan September 2020. Sedangkan pada bulan Maret 2021 Pada bulan Maret 2021 penduduk miskin perkotaan pengeluaran terbesar untuk belanja jenis makanan sebesar 66,23 persen untuk pembelian beras sebesar 15,171 persen dan rokok sebesar 10,44 persen. GK menjadi sebesar Rp. 642.425 per kapita per bulan.

Sedangkan penduduk perdesaan pengeluaran belanja jenis makanan sebesar 74,55 persen, untuk pembelian beras sebesar 20,11 persen dan rokok sebesar 10,62 persen.

Selama kurun waktu sebelum pandemi covid-19, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau baik jumlah maupun presentase relative berhasilkan diturunkan

**Tabel 2.** Jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2021

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Sept 2019	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021	Sept 2019	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021
<b>Kepulauan Riau</b>	104.23	108.85	121.82					
<b>Perkotaan</b>	4	923.10	320.78	124.896	5,26	5,42	5,69	5,72
<b>Perdesaan</b>	23.924	7	8	19.566	10,67	10,43	11,25	11,10
<b>Total</b>	127.75	131.56	142.61	144.462	5,80	5,92	6,13	6,12
	8	6	1					

Sumber: BPS (2019-2021, diolah)

Sebelum pandemi covid-19, penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat seperti program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil.

Namun demikian, pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terlihat pada bulan September tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 127.758 jiwa, yang terdiri dari penduduk miskin di perkotaan sebesar 104.234 jiwa dan penduduk miskin di perdesaan sebesar 23.924 jiwa. Pada bulan Maret 2021 terjadi kenaikan menjadi sebesar 144.462 jiwa,

yang terdiri dari penduduk miskin di perkotaan sebesar 124.896 jiwa dan penduduk miskin di perdesaan sebesar 19.566 jiwa.

Jika dilihat dari presentase penduduk miskin, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September 2019 sebesar 5,80 persen terjadi lonjakan menjadi sebesar 6,12 persen pada bulan Maret 2021. Pada bulan September 2019 sebesar 5,26 persen di perkotaan, sedangkan di perdesaan sebesar 10,67 persen. Pada bulan Maret 2021 sebesar 5,72 persen di perkotaan, sedangkan di perdesaan sebesar 11,10 persen.

### Koefisien Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek untuk mengukur kemiskinan relatif. Karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan dengan pendekatan data pengeluaran. Analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan memanfaatkan data pengeluaran rumah tangga. Ada dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien gini (*gini ratio*) dan ukuran Bank Dunia.

Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan distribusi yang dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, di mana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya pendapatan sedangkan yang lainnya pendapatannya tidak ada.

Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva Lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Kurva Lorenz memetakan kumulatif pendapatan pada sumbu vertikal dengan kumulatif penduduk pada sumbu horisontal. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel pendapatan dengan distribusi persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien gini, grafik persentase kumulatif penduduk dari termiskin hingga terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pendapatan (pengeluaran) digambar pada sumbu vertikal. Jika nilai koefisien gini di bawah 0,3 menandakan ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah tersebut rendah. Pada interval 0,3-0,5 dalam skala nilai koefisien gini, ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah adalah sedang, sedangkan dikatakan ketimpangannya tinggi jika nilainya koefisien gini di atas 0,5.

Berdasarkan data BPS tahun 2019-2021, koefisien gini di Provinsi Kepulauan Riau antara 0,337 – 0,343 dan adanya kecenderungan naik akibat tekanan pandemi covid-19 dengan kategori sedang.

**Tabel 3.** Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2019-2021

Wilayah	Koefisien Gini Ratio			
	Sept 2019	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021
<b>Kepulauan Riau</b>				
<b>Perkotaan</b>	0,335	0,337	0,335	0,341
<b>Perdesaan</b>	0,262	0,260	0,260	0,256
<b>Perkotaan dan Perdesaan</b>	0,337	0,339	0,334	0,343

Sumber: BPS (2019-2021, diolah)

Kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional. Pada bulan September 2019, nilai koefisien gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,337 terjadi kenaikan sampai bulan Maret 2021 menjadi 0,343. Artinya ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau berada pada kategori sedang. Yang menarik jika dibandingkan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan koefisien gini di wilayah perdesaan lebih baik dibandingkan perkotaan. Wilayah perdesaan kategori rendah, sedangkan perkotaan kategori sedang.

Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau belum dapat menurunkan koefisien gini secara lebih nyata. Hal ini disebabkan masih belum disepakati data penduduk miskin yang menjadi sasaran program. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki sasaran sendiri-sendiri dan belum mengacu pada satu data berdasar DTKS. Hal lainnya adalah akibat tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada bulan September 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,96 persen yang berarti kategori ketimpangan rendah. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan bila dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret 2020 yang sebesar 19,26 persen. Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,20 sedangkan pada bulan Maret 2021 sebesar 19,09 persen yang berarti kategori ketimpangan masih tetap rendah.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada bulan September 2019 tercatat sebesar 19,72 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini juga mengarah kepada penurunan distribusi pengeluaran menjadi sebesar 19,07 persen pada bulan Maret 2021. Sedangkan di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat pada bulan September 2019 tercatat sebesar 23,82 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Peningkatan distribusi pengeluaran menjadi sebesar 23,89 persen pada bulan Maret 2021. Data distribusi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Distribusi Pengeluaran 40 Persen Penduduk Terbawah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2019-2021

Wilayah	Distribusi Pengeluaran 40 Persen Penduduk Terbawah			
	Sept 2019	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021
<b>Kepulauan Riau</b>				
Perkotaan	19,72	19,34	20,21	19,07
Perdesaan	23,82	23,76	24,12	23,89
Perkotaan dan Perdesaan	19,96	19,26	20,20	19,09

Sumber: BPS (2019-2021, diolah)

Dari Tabel 4 yang menarik adalah ketimpangan di wilayah perdesaan lebih baik dibandingkan wilayah perkotaan. Selama tahun 2019-2021 wilayah perkotaan distribusi

pengeluaran 40 persen penduduk terbawah sebesar 19,07-20,21, sedangkan wilayah perdesaan sebesar 23,76-24,12.

Perkembangan distribusi pendapatan 40% penduduk termiskin dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan tingkat ketimpangan rendah. Perkembangan distribusi pendapatan 40% penduduk termiskin Provinsi Kepulauan Riau dari bulan September 2019 sampai bulan Maret 2021 dengan tingkat ketimpangan rendah.

Pada tahun 2010 tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 21,80 persen cenderung turun. Pada bulan Maret 2019 menjadi sebesar 18,87 persen. Jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan rata-rata provinsi di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau termasuk yang berhasil menaikkan distribusi pendapatan masyarakat 40% terendah. Demikian pula halnya bila dilihat berdasarkan tipe wilayah, maka baik wilayah perdesaan maupun perkotaan berada pada kategori *low inequality*. Namun demikian ketimpangan lebih baik di perdesaan dibandingkan di perkotaan.

### **Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan**

Upaya penanggulangan kemiskinan tentu tidak hanya berfokus pada beberapa jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Lebih daripada itu, penanggulangan kemiskinan harus meliputi beberapa aspek, seperti seberapa jauh selisih pendapatan penduduk miskin dari GK serta distribusi pengeluaran antara penduduk miskin. Ada tiga ukuran kemiskinan yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Ukuran tersebut adalah *poverty incidence* ( $P_0$ ) merupakan ukuran yang menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Angka ini memiliki kelemahan karena tidak menggambarkan seberapa parah kemiskinan yang terjadi di suatu daerah. Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap* ( $P_1$ ), mengukur seberapa jauh jurang/gap pendapatan penduduk miskin dari GK, akan tetapi tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin serta tidak terdeteksi distribusi antar penduduk miskin yang timpang. Ukuran terakhir adalah Indeks Keparahan Kemiskinan/*poverty severity* ( $P_2$ ), mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Kelemahan dari  $P_2$  adalah tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin.

Dalam analisis kemiskinan dan pengambilan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan, ketiga ukuran kemiskinan ini harus disertakan. Dengan mempertimbangkan ketiga ukuran tersebut, diharapkan kebijakan yang akan diambil dapat menyentuh seluruh aspek sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seperti halnya jumlah persentase penduduk miskin yang menunjukkan trend fluktuatif, nilai  $P_1$  dan  $P_2$  juga menunjukkan pola yang hampir sama.

Apabila dilihat dari trend nya, di Indonesia, nilai  $P_1$  dan nilai  $P_2$  menunjukkan penurunan. Dengan kata lain nilai  $P_1$  yang cukup tinggi (lebih dari 1) pada periode tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi penduduk miskin masih terpuruk. Penurunan nilai  $P_1$  mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, demikian pula halnya dengan kenaikan nilai indeks, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) di Provinsi Kepulauan Riau relatif lebih baik. Penurunan nilai  $P_1$  mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan,

demikian pula halnya dengan kenaikan nilai indeks, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Peningkatan pada indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin meningkat. Apabila dilihat dari *trendnya*, nilai  $P_1$  untuk daerah perkotaan menunjukkan penurunan. Berbeda dengan daerah perdesaan yang terlihat naik dengan nilai  $P_1$  lebih dari 1. Artinya, penduduk miskin di perdesaan semakin jauh dari garis kemiskinan.

Namun demikian, secara umum di Provinsi Kepulauan Riau indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan kehidupan ekonominya lebih baik.

**Tabel 5.** Perkembangan  $P_1$  dan  $P_2$  di Kepulauan Riau, Tahun, Tahun 2019–2021

Tahun	Indeks Kedalaman ( $P_1$ )			Indeks Keparahan ( $P_2$ )		
	Desa	Kota	K+D	Desa	Kota	K+D
September 2019	1,508	0,832	0,900	0,353	0,160	0,180
Maret 2020	1,844	1,024	1,106	0,435	0,268	0,285
September 2020	1,888	1,155	1,213	0,513	0,415	0,423
Maret 2021	1,747	1,015	1,070	0,413	0,270	0,280

Sumber: BPS, 2019-2021 (diolah)

Dari Tabel 5, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2019 adalah 0,900 dan pada Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,106. Sedangkan pada September 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,213 dan pada Maret 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,070. Dengan demikian, kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,180 pada September 2019 menjadi 0,285 pada Maret 2020. Sedangkan pada September 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,423 dan pada Maret 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,280. Dengan demikian, kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi dari garis kemiskinan.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) untuk daerah perkotaan sebesar 1,024 sementara di daerah perdesaan sebesar 1,844. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) untuk perkotaan adalah 0,268 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,435. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) untuk daerah perkotaan sebesar 1,015 sementara di daerah perdesaan sebesar 1,747. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) untuk perkotaan adalah 0,270 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,413. Nilai  $P_2$  di perdesaan jauh lebih tinggi dari perkotaan, dan menunjukkan trend meningkat pada wilayah perdesaan maupun perkotaan. Artinya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin lebih tinggi di wilayah perkotaan

dibandingkan dengan perdesaan. Ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.

Dari uraian di atas mengenai perkembangan nilai  $P_0$ ,  $P_1$  dan  $P_2$ , maka dapat dilihat bahwa pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan membutuhkan biaya, waktu dan perhatian yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Usaha pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan hendaknya dibarengi dengan pembangunan baik pembangunan fisik maupun manusianya. Dengan kondisi geografis di Provinsi Kepulauan Riau yang cenderung sulit dalam masalah transportasi, akses menjadi masalah utama dalam hal pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunnya, agar negara kita bisa berkembang dan maju serta sejajar dengan negara maju yang sejahtera. Program penanggulangan kemiskinan yang dibuat MOU antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2010 sebaiknya dapat diprogramkan kembali agar jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat menurun, sehingga koefisien gini semakin mengecil dan distribusi pendapatan semakin merata.

## **PENUTUP**

Dari hasil dan pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada: (1). Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau baik jumlah maupun presentase kecenderungan terjadi kenaikan; (2) Koefisien gini penduduk miskin terjadi kenaikan dan terjadinya ketimbangan distribusi pendapatan; (3). Rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan; dan (4). Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah belum mampu menurunkan jumlah dan presentase penduduk miskin.

Program penanggulangan kemiskinan yang dibuat MOU antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2010 sebaiknya dapat diprogramkan kembali agar jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat menurun, sehingga koefisien gini semakin mengecil dan distribusi pendapatan semakin merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2021. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Maret 2021. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2020. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.

- Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau September 2020. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2020. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Maret 2020. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2019. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Berita Resmi Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau September 2019. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau 2020. BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2021. BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.
- Hartoto. 2020. Analisis Data Kemiskinan dan Profil DTKS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019. Kerjasama Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dengan STAI Miftahul Ulum, Tanjungpinang.
- Hartoto. 2019. Kajian Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007-2017. Jurnal Tabir, Edisi II Januari-Juni 2019. STAI Miftahul Ulum, Tanjungpinang.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- World Bank. 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. World Bank, Washington, USA.